

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- \_\_\_\_\_. *Menguak Tabir Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017),
- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-2. (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010).
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Apeldoorn, L. J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-24. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990).
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-6. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Damanik, Sehat. *Hukum Acara Perburuhan (Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Menurut No. 2 Tahun 2004, Disertai Contoh Kasus)*. Cetakan IV (Jakarta: DSS Publishing, 2007).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif, dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cetakan I. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Cetakan Ke-20. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).
- Djumaldji, F.X. *Perjanjian Kerja*. Edisi Revisi. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Ence, Irianto A. Baso. *Negara Hukum dan Hak Uji konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi, telaah terhadap kewenangan mahkamah konstitusi*. (Bandung: Alumni, 2008).
- Holsti, Ole R. *Content Analysis for The Social Sciences and Humanities*. (Reading Mass: Addison-Wesley, 1969).
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan Ke-1. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Husni, Lalu *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan*. Edisi 1. Cetakan 3. (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2007).
- Machmud, Syahrul. *Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial*. Cetakan I. (Jakarta: Graha Ilmu, 2014).

- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi Cetakan Ke-4. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Mulyadi, Lilik dan Agus Subroto. *Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial dalam Teori dan Praktik*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. (Bandung: PT Alumni, 2011).
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).
- Panggabean, Henry. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001).
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitina Hukum*. Cetakan 3. (Jakarta Indonesia UI Press, 2015).
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1995).
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Pembentukannya*. (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Tjandra, Surya dan Jafar SuryomEnggolo (ed). *Makin Terang Bagi Kami, Belajar Hukum Perburuhan*. (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI; Katalog Dalam Terbitan, 2006).
- Uwiyono, Aloysius et.al. *Asas-asas Hukum Perburuhan*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Yanlua, Mohdar dan Evy Savitri Gani. *Hukum Dagang*. (Magetan: Media Guru, 2014).

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 4279)*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356)*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

\_\_\_\_\_. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Pemberitahuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*.

\_\_\_\_\_. *Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja*

### C. Artikel

Geme, Maria Theresia. "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur." Disertasi Program Doktor Ilm Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. (Malang, 2012).

Khairani, Safira. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Hak Upah Minimum Yang Belum Sepenuhnya Dibayar (Studi Terhadap Putusan Nomor 58/K/Pdt.Sus-Phi/2015)*. Jurnal Hukum Adigma Universitas Tarumanagara. 2018.

Prahassacitta, Vidya. *Makna Upah Proses Menurut Mahkamah Konstitusi Dibandingkan dengan Beberapa Putusan Mahkamah Agung*. Volume 6. Nomor 3. (Jakarta: Jurnal Yudisial Fakultas Hukum Universitas Bina Nusantara, 2013).

Wijayanta, Tata. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Pengadilan Niaga*. Vol. 14 No. 2 Mei 2004. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2004).

### D. Putusan

Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011*.

\_\_\_\_\_. *Putusan MA Nomor 848 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 6 Mei 2010 juncto Nomor 112/PHI.G/2009/PN.JKT.PST*

\_\_\_\_\_. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.JKT.PST.

\_\_\_\_\_. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 323K/Pdt.Sus-PHI/2015.

\_\_\_\_\_. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.BDG.

\_\_\_\_\_. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 576K/Pdt.Sus-PHI/2015.

\_\_\_\_\_. *Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 80/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG.*

\_\_\_\_\_. *Putusan Kasasi Nomor 38K/PDT.SUS-PHI/2018.*